PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 27 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 32 s/d 42 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Per-wakilan Desa Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1946 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Th. 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pemerintahan Desa.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman umum Pengaturan Mengenai desa.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
- b. Badan Perwakilan Desa adalah lembaga pemerintah desa yang anggota-anggotanya terbentuk dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, Tokoh Adat, Agama, Organisasi sosial Politik, dan golongan Profesi Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

1. Tujuan pembentukan Badan Perwakilan Desa adalah untuk memperkuat Pemerintahan Desa serta mewadahi perwujudan pelaksanaan Demokrasi berdasarkan Pancasila di Desa.
2. Badan Perwakilan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Pembentukan Badan Perwakilan Desa dan keanggotaannya didasarkan pada hasil pemilihan/musyawarah pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang bersangkutan.

Pasal 4

1. Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan.
2. Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS dan FUNGSI

Pasal 5

1. Badan Perwakilan Desa dalam Susunan Organisasi Pemerintahan Desa adalah mitra sejajar Kepala Desa dan wadah Permusyawaratan dalam Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Desa.
2. Badan Perwakilan Desa mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat masyarakat dalam setiap rencana yang diajukan Kepala Desa sebelum dijadikan Keputusan Desa.
3. Badan Perwakilan Desa berfungsi :
 - a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adapt istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.

- b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa.
- c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.
- d. Menampung Aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.

BAB IV KEANGGOTAAN DAN PENGURUS

Pasal 6

Keanggotaan Badan Perwakilan Desa dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
- c. Tidak pernah, terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G. 30 S/PKI atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya SD/ berpengetahuan sederajat.
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.
- h. Berkelakuan baik, jujur, dan adil.
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan Tindak Pidana.
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.
- k. Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat.
- l. Bersedia dicalonkan.
- m. Memenuhi syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 7

Pengurus Badan Perwakilan Desa terdiri dari :

- a. Ketua dan Wakil Ketua.
- b. Sekertaris.
- c. Anggota dipilih oleh masyarakat sesuai dengan jumlah penduduk yaitu :
 - a. Sampai dengan 1500 jiwa, 5 anggota.
 - b. B1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 anggota.
 - c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 anggota.
 - d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 anggota.
 - e. Lebih dari 3000 jiwa, 13 anggota.

Pasal 8

1. Pengurus Badan Perwakilan Desa dipilih, dari dan oleh anggota BPD dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Pengurus Badan Perwakilan Desa tidak boleh merangkap jabatan/tugas di Pemerintahan desa.
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya SD/ Sederajat.